

**TAHUN
2022**



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022



SEKRETARIAT DPRD KAB. KEP SELAYAR

Jl. Jend Ahmad Yani No. 1, Benteng
Telp. (0414) 21714 No. Faks. (0414) 21097
Kab. Kepulauan Selayar 92812

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terselesaikan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2022 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar baik yang telah berhasil mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun yang belum mencapai target.

Kami berharap Laporan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Sekretaris DPRD

Kabupaten Kepulauan Selayar



MASDAR J PRATAMA, S.Kom,MM

Pangkat : Pembina c

NIP. 198406022010011012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Gambaran Umum Sekretariat DPRD	2
D. Isu-Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Indikator Kinerja Utama.....	14
C. Rencana Kinerja Tahunan.....	15
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2021	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Pengukuran Kinerja.....	18
B. Analisis Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	18
C. Realisasi Keuangan	40
BAB IV PENUTUP.....	44
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan	6
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026	13
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	14
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD	15
Tabel 2.4 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022	15
Tabel 2.5 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	16
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar	18
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022	19
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Sasaran 1	20
Tabel 3.4 Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Pendukung Sasaran 1	21
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Sasaran 2	23
Tabel 3.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Pendukung Sasaran 2	24
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Sasaran 3	25
Tabel 3.8 Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Pendukung Sasaran 3	26
Tabel 3.9 Penilaian Quisisioner Survey IKPL Sekretariat DPRD	28
Tabel 3.10 Perhitungan Penilaian Quisisioner Survey IKPL Sekretariat DPRD ..	30
Tabel 3.11 Penyelarasan / Pengintegrasian Program Kerja DPRD Ke Dalam Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD TA 2021	33
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Berdasarkan Peruntukannya	40
Tabel 3.13 Capaian Realisasi Anggaran TA 2022 Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	3
Gambar 2.2 Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar.....	12

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kepulauan Selayar tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD
 - Sasaran 1 yang didukung oleh 2 program, 10 kegiatan dan 37 sub kegiatan telah dilaksanakan dengan realisasi dan capaian 98%;
 - Adapun target yang tidak tercapai yakni pada sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD dikarenakan kurangnya Sumber Daya dalam menyusun Laporan Kinerja DPRD.
 - Nilai SAKIP SKPD Tahun 2022 dengan kategori kurang atau predikat C (58,33) dengan rekomendasi yang telah dijabarkan di atas, menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan upaya memenuhi rekomendasi yang tertuang dalam LHE SAKIP.

 2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD
 - Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran 2 telah dilaksanakan secara keseluruhan dengan realisasi dan capaian 100% diperoleh dari komitmen dan kerja sama dari masing-masing pihak yang terlibat;
 - Realisasi capaian sasaran 2 yakni “Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD” dengan indikator Laporan Keuangan yang sesuai SAP tahun 2022 telah sesuai SAP dan mencapai target.

 3. Sasaran 3 : Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan
 - a. Indikator 1 : Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat
 - Realisasi dan Capaian indikator Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat Tahun 2022 diperoleh nilai 77 dengan persentase capaian dari target adalah 108% yang diperoleh dari hasil survey yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD melalui website <http://www.ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/> yang dapat diakses oleh 25 Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Responden Survey Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat adalah 25 orang Anggota DPRD Kab. Kep Selayar atas 27 pernyataan sehingga diperoleh total 675 jawaban bervariasi dengan skala penilaian Sangat Puas dengan skor 5, Puas dengan Skor 4, Kurang Puas dengan skor 3, Tidak Puas dengan skor 2, dan Sangat Tidak Puas

dengan skor 1. Dari Tabel 3.10 diatas diperoleh angka bahwa dari 25 Anggota DPRD Kab Kep. Selayar dengan 27 pernyataan diperoleh 675 jawaban dengan penilaian yakni 581 Jawaban Puas, 82 Jawaban Kurang Puas dan 1 jawaban Tidak Puas.

- b. Indikator 2 : Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu
- Realisasi dan Capaian indikator Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu diperoleh nilai 100%, keberhasilan ini didukung oleh komitmen dan kerja sama Sekretariat DPRD, Anggota DPRD dan pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kerja DPRD;
 - Adapun sub kegiatan Penyusunan Naskah Akademik yang difocusing karena mempertimbangkan keadaan anggaran dan kepentingan pelaksanaan sub kegiatan/kegiatan.

Total Anggaran tahun 2022 sebesar 35.790.369.720 dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp 35.289.519.173 atau 98,6%, secara keseluruhan sub kegiatan/kegiatan/program telah berjalan dengan baik dengan serapan anggaran secara maksimal dalam mendukung kinerja subkegiatan/kegiatan/program.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada tingkat daerah dan memajukan kesejahteraan, Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut daerah otonom diberikan kepercayaan dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat terkait hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian dalam pelaksanaan otonomi, untuk menghindari bias-bias penyalahgunaan kewenangan dan sesuai dengan amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pemerintah Daerah perlu untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, *legitimate* dan akuntabel,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *akar government*), serta meningkatkan kualitas pelayanan. Penyusunan LAKIP diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tata cara Review atas LAKIP Instansi. LAKIP dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam program/kegiatan yang telah direncanakan pada suatu Tahun Anggaran. Sesuai dengan penjelasan kebutuhan akan pertanggungjawaban akuntabilitas dan amanat dari peraturan di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun LAKIP sebagai transparansi informasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis

perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa tujuan pelaporan kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar memuat informasi dan data yang telah diolah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan resposibilitas atas pemberian mandat, delegasi, wewenang ataupun amanah juga implementasi dari perencanaan strategis serta tolak ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi organisasi.

Maksud dari penyusunan LAKIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Selayar secara manajerial kepada Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder (DPRD dan masyarakat),

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah :

1. Memberikan informasi mengenai kinerja secretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Merupakan media evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
3. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang dan Merupakan media dalam upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

C. Gambaran Umum Sekretariat DPRD

DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah lembaga representasi rakyat yang berkedudukan sebagai salah satu penyelenggara urusan pemerintahan daerah dengan tiga fungsi yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, DPRD memperoleh dukungan administratif dan operasional oleh Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Berdasarkan Rencana Srategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2026, Sekretariat DPRD sesuai perda No. 4 tahun 2020, mempunyai tugas dan fungsi “*Sebagai Unsur Pelayanan*

terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD dibantu oleh pejabat struktural eselon III, yaitu Kepala Bagian, dan eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian, dan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang membawahi tiga bagian, yakni:

- a. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :
 - Sub. Bagian Program dan Keuangan;
 - Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
- b. Bagian Pengawasan dan Penganggaran terdiri dari :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :
Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2022

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, "*Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD*". Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan serta pemberian dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Sekretariat DPRD dan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan Sekretariat DPRD dan administrasi keuangan DPRD;
- Penyelenggaraan dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD di bidang legislasi;
- Penyelenggaraan dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan pengawasan; dan
- Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan Fungsinya.

b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Bagian umum dan keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :

- Sub bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Keuangan dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD.
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset, pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan Fungsi dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD di bidang legislasi.
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan Fungsi dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD di bidang penganggaran dan pengawasan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Komposisi Sumber Daya Aparatur

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar **per 31 Desember 2022** didukung oleh sumber daya aparatur ASN sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Berikut kualifikasi jabatan Pegawai lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 1.1**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan**

No	Jabatan	Formasi	Pegawai Yang Ada	Kekurangan
1	2	3	4	5
A.	Jabatan Struktural			
1.	Sekretaris DPRD	1	1	0
2.	Kabag Umum dan Keuangan	1	1	0
3.	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1	1	0
4.	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1	1	0
5.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Hukum	1	1	0
6.	Kasubbag Program dan Keuangan	1	1	0
B.	Jabatan Fungsional Tertentu			
1.	Perisalah Legislatif Ahli Muda	1	1	0
2.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	1	1	0
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	2	0
C.	Jabatan Pelaksana			
1.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1	1	0
2.	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Anggaran	1	1	0
3.	Bendahara	1	1	0
4.	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	1	1	0
5.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	1	0
6.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
7.	Pranata Laporan Keuangan	1	0	1
8.	Penyusun Risalah	1	0	1
9.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	1	0	1
10.	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	1	0	1
11.	Pengelola Program dan Keuangan	1	0	1
12.	Pengelola Keuangan	1	0	1
13.	Pengelola Gaji	1	0	1
14.	Petugas Protokol	1	0	1
15.	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	1	0	1
16.	Pengadministrasian Keuangan	1	1	0
17.	Pengadministrasian Umum	1	1	0
18.	Pengadministrasian Hukum	1	1	0
19.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1	1	0
20.	Pengadministrasian Kepegawaian	1	1	0
21.	Pengadministrasian Pemeliharaan Gedung Kantor	1	1	0
22.	Pengadministrasian Rapat	1	1	0
23.	Pengadministrasian Risalah	1	1	0
24.	Pengadministrasian Pengaduan Publik	1	0	1
25.	Ajudan	1	0	1

26.	Pengemudi	3	3	0
	Jumlah	38	27	11

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2022

Sumber Daya Aparatur adalah salah-satu faktor yang menunjang kinerja suatu instansi. Dari Tabel 1.1. di atas dapat dilihat bahwa dari 38 formasi yang dibutuhkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang terpenuhi hanya 27 Pegawai, masih terdapat 11 kekurangan pegawai dengan spesifikasi jabatan yang berbeda-beda. Adanya kekurangan sumber daya pada Sekretariat DPRD mengakibatkan *job desk* dari suatu jabatan dikerjakan oleh pihak yang bukan pada bidangnya sehingga selain beban kerja yang tumpang tindih, kualitas dari *output* yang dihasilkan juga masih rendah. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja adalah dengan memenuhi formasi yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD.

4. Keadaan Sarana dan Prasarana

a. Bangunan Gedung

Sekretariat DPRD menempati bangunan berlokasi di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Gedung Sekretariat DPRD dengan luas bangunan ±940 m², terdiri dari 5 gedung yakni 4 gedung operasional kantor dan 1 gedung tempat ibadah. Untuk rincinya gedung A terdiri dari 2 lantai, gedung B terdiri dari 3 lantai, gedung C terdiri dari dua lantai, gedung D terdiri dari 2 lantai dan gedung E sebagai tempat ibadah terdiri dari 1 lantai

b. Sarana Transportasi, Informasi dan Komunikasi

a. Sarana Transportasi

Kendaraan bermotor operasional di Sekretariat DPRD per 31 Desember 2022 terdiri atas Kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, serta kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

Kendaraan roda empat Pimpinan DPRD : 3 unit
 Kendaraan roda empat Sekretariat DPRD : 2 unit
 Kendaraan roda 2 : 33 unit

b. Sarana Pendukung Lainnya

Sarana pendukung lainnya yang tersedia antara lain Jaringan Internet, CCTV, Laptop, komputer, Printer, LCD, Sound, AC , Kulkas, dll.

Sarana dan Prasarana pada Sekretariat secara umum telah mencukupi namun masih perlu untuk ditingkatkan dalam hal pemeliharaan kualitas ataupun

beberapa sarana yang sudah mencapai masa penggantian, dipandang perlu untuk segera diganti dengan yang baru untuk meningkatkan daya dukung bagi fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD.

D. Isu-Isu Strategis

Sekretariat DPRD memiliki dua tanggung jawab yakni secara administratif dan operasional. Secara administratif Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dan secara operasional Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Anggota DPRD. Sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya DPRD perlu untuk menyeimbangkan kedua tanggung jawab tersebut dengan berbagai faktor eksternal dan internal yang berada di lingkungan Sekretariat DPRD. Sebagai lembaga birokrasi, Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada DPRD dituntut untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan harus memiliki mentalitas kuat dan kemampuan untuk mengakomodir kepentingan dalam mendukung kinerja DPRD.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut kemudian dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Sehingga diperlukan kemampuan untuk mengenali serta merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu-isu Strategis ditetapkan melalui analisa lingkungan kerja berupa faktor eksternal dan internal untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya yang dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Adapun yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, meliputi:

1. Iklim organisasi cenderung bernuansa politik yang berpengaruh terhadap motivasi kerja pejabat Sekretariat DPRD. Benturan kepentingan yang seringkali terjadi menuntut mentalitas yang kuat dalam mengakomodir berbagai kepentingan semua pihak;
2. Kesadaran akan tanggung jawab dan disiplin kerja aparat masih rendah, terdapat beberapa aparat yang masih lalai terhadap tanggung jawabnya dan memberikan beban kerja kepada pihak lain;
3. miskomunikasi antara Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD terkait pemahaman dan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan;
4. Pengaturan penempatan pegawai (pimpinan dan staf) belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikannya, hal ini tentu saja

mempengaruhi kinerja dari suatu bagian ataupun instansi karena adanya kemungkinan proses penyelesaian pekerjaan berjalan secara tidak efektif dan efisien dan tentunya akan berdampak pada belum optimalnya pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

5. Keterbatasan SDM dalam menguasai Bidang Informasi dan Teknologi sehingga pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar masih rendah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki pedoman Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen perencanaan dalam jangka waktu lima tahun yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas, fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Kemudian Renstra Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah adalah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD dan demi mendapatkan perencanaan yang baik, manageable, selaras dengan manajemen pemerintah daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2021 - 2026, Visi RPJMN 2020-2024 , Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat dan mandiri , serta arahan dari visi RPJMD 2016-2021, RPJMD Propinsi

Sulawesi Selatan 2018 – 2023 , dan visi RPJPD Kab Kepulauan Selayar 2005 – 2025 adalah Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, mandiri dan berkelanjutan maka Visi RPJMD kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah :

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.

Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki Kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar muat barang, serta perdagangan industry. Indikator yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan Visi Bandar maritime adalah:

1. Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan Sumber Daya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar sebagai penyuplay kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia ekspor perikanan dan non perikanan ; Peningkatan pelayanan , pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah .

Bandar maritime didukung oleh 3 pilar pembangunan yaitu :

- 1) Kawasan Distribusi Logistik
- 2) Kawasan ekonomi Khusus
- 3) Kawasan industri Perikanan terpadu

Berdasarkan dari landasan mewujudkan visi pembangunan Kabupaten kepulauan Selayar, maka misi RPJMD 2021– 2026 adalah :

- 1) Mengembangkan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparat
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan pedesaan
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- 4) Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman
- 5) Meningkatkan pembinaan kehidupan social dan keagamaan
- 6) Meningkatkan pengelolaan Lingkungan hidup

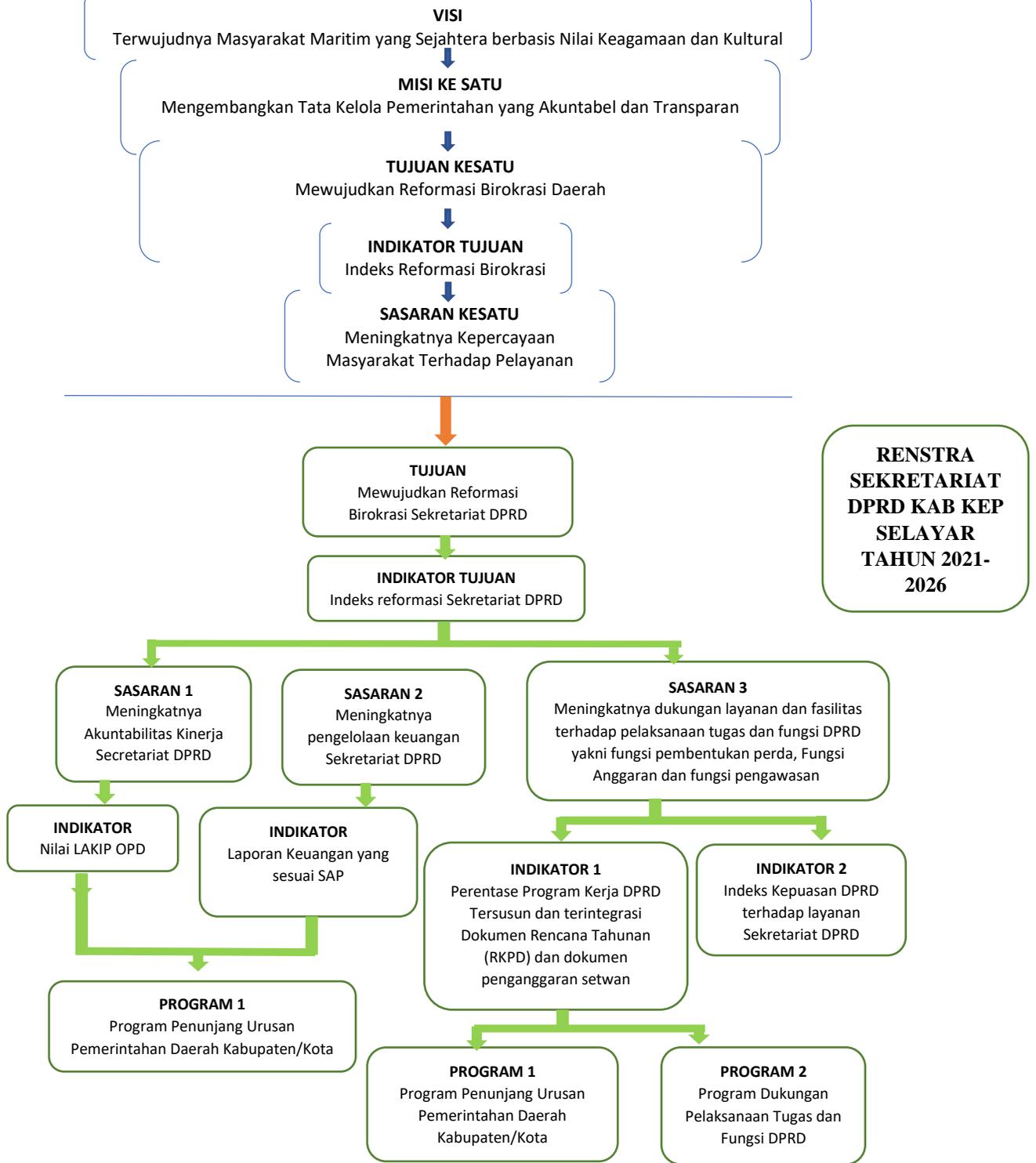
Berangkat dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 serta berdasarkan tugas pokok fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar

mendukung pencapaian Misi Kepala Daerah yaitu pada misi Ke-1 :
 “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan
 Transparan”

Berikut cascading Sekretariat DPRD :

Gambar 2.1

**Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar
 RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021-2026**



2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Cascading Kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar mendukung Tujuan Kesatu (T1), Sasaran kesatu (S1) RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar lima tahun kedepan adalah :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan /Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD		Indeks reformasi Sekretariat DPRD	33,89 (C)	55,00 (CC)	64,00 (CC)	68,00 (B)	73,00 (B)	76,00 (A)	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP SKPD		B(60)	B(65)	BB(70)	BB(75)	(A)80	
	Meningkatnya pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	Laporan Keuangan yang sesuai SAP		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan		Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu		100	100	100	100	100
			Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat		65	70	75	80	85

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar 2021-2026

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan perangkat daerah. Strategi dimaksud dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dan kegiatan.

Tabel 2.2**Strategi dan Arah Kebijakan**

SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM yang ditunjang perangkat teknologi informasi	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil	Peningkatan sarana prasarana
	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku	
Meningkatnya kualitas dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dukungan fasilitasi administrasi keuangan, persidangan, dan penyediaan tenaga ahli 2. Peningkatan system/digitalisasi program kegiatan

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2021-2026

B. Indikator Kinerja Utama

Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Kemudian untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka diperlukan penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, adapun target Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				ALASAN FORMULASI/ RUMUS HITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP SKPD	Skala Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat	Inspektorat
2.	Meningkatnya pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	Laporan Keuangan yang sesuai SAP	Skala Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat	Inspektorat
3.	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	%	Jumlah program kerja yang di rencanakan dan jumlah yang terealisasi tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar
		Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat	Skala Nilai	Survey Kepuasan	Anggota DPRD Kab. Kep. Selayar

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2021-2026

C. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran dan membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah. Target kinerja sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan menjadi pertimbangan dan penentu pada saat pengalokasian anggaran. Indikator Kinerja ditentukan dengan berorientasi pada output dan outcome yang dihasilkan sehingga pada target kinerja dapat diperoleh ukuran keberhasilan dari suatu program, kegiatan ataupun sub kegiatan. Adapun sasaran dan Indikator kinerja Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Kinerja Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP SKPD	B(60)
2.	Meningkatnya pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	Laporan Keuangan yang sesuai SAP	Sesuai

3.	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat	65
		Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100

Sumber : Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022

Adapun yang menjadi struktur program dan kegiatan yang berkaitan dan menjadi pendukung tercapainya target Kinerja Sekretariat DPRD Kab Kep Selayar Tahun 2022 sebagaimana berikut.

Tabel 2.5
Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.732.007.320
Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	195.686.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.054.633.500
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	39.510.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	747.830.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	972.396.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.016.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.063.005
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	660.670.000
Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	12.198.008.815
Layanan Administrasi DPRD	77.193.000
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18.058.362.400,00
Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	3.397.139.100
Pembahasan Kebijakan Anggaran	787.341.200
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.220.280.000
Peningkatan Kapasitas DPRD	5.574.407.500
Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.471.209.000
Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD	75.000.000
Fasilitasi Tugas DPRD	4.532.985.600
Total Anggaran 2022 (APBD Perubahan Tahun 2022)	35.790.369.720,00

Sumber : DPA Sekretariat DPRD Kab Kep Selayar Tahun 2022

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, LAKIP dan tata cara review pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan No. kinerja.

Adapun yang menjadi Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP SKPD	B(60)
2.	Meningkatnya pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	Laporan Keuangan yang sesuai SAP	Sesuai
3.	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100%
		Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat	65

Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2022

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2022

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat DPRD adalah adalah aplikasi SIPEJABAT link : <http://sipejabat.kepulauanselayarkab.go.id/login.php> yang mengintegrasikan Rencana Kinerja, Rencana Aksi dan Pengukuran Kinerja capaian kinerja triwulanan dan Aplikasi *E-survey* untuk mengukur indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat : <http://www.ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/>, *E-survey* ini telah mengacu kepada permenpan No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % \geq	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi,

(1) *semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:*

$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$

B. Analisis Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Penilaian terhadap capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dilandaskan pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Dalam perjanjian kinerja berupa indikator kinerja dan target kinerja berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Analisis Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2022			
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE
2	3	4	7	8	9	10
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	<u>Indikator:</u> Nilai SAKIP SKPD <u>Meta Indikator:</u> Hasil Nilai SAKIP dari Inspektorat	Skala Nilai	B	C (58,33)	C (58,33)	Rendah
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD	<u>Indikator:</u> Laporan Keuangan yang sesuai SAP <u>Meta Indikator:</u> Hasil Penilaian Laporan Keuangan Oleh Inspektorat	WTP	Sesuai	Sesuai	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan	<u>Indikator:</u> Persentase pelaksanaan Program kerja DPRD tepat waktu <u>Meta Indikator:</u> Realisasi Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah + Realisasi Program Pengembangan Regulasi Daerah + Realisasi Program _____ X 100%	Nilai	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	3	%	65	77	118%	Sangat Tinggi
	<u>Indikator:</u> Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat <u>Meta Indikator:</u> Hasil survey Kepuasan oleh Anggota DPRD					

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2022

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

- Realisasi capaian sasaran 1 yakni **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD”** dengan indikator Nilai SAKIP SKPD untuk tahun 2022 berdasarkan Surat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar No. 076/LAKIP/IV/2022/ITDA memperoleh nilai C (58,33). Pada tahun ini belum mencapai target yang telah ditetapkan , Ada beberapa catatan yang menjadi rekomendasi dari

kekurangan pada nilai Lakip Tahun 2022 yang diperoleh, yakni:

a. Perencanaan Kinerja :

Memanfaatkan rencana kinerja tahunan / rencana kerja dalam penyusunan anggaran

b. Pengukuran Kinerja :

- Melakukan pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi secara berkala; dan
- Mengembangkan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi

c. Evaluasi Internal :

- Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan perencanaan
- Memanfaatkan hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang; dan
- Memanfaatkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi

d. Pencapaian Kinerja :

Meningkatkan Capaian Kinerja serta membandingkannya dengan tahun sebelumnya

Target kinerja dari sasaran 1 : ***“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD”*** dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3

Target dan Realisasi Sasaran 1

SASARAN 1					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP SKPD	Hasil Nilai SAKIP dari Inspektorat	B	C	C

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 202

Pada tahun ini Sekretariat DPRD telah berupaya untuk melaksanakan semua rekomendasi dari Inspektorat. 2 Program yang terdiri dari 37 Sub Kegiatan mendukung pencapaian target daeri sasaran 1 . Berikut nilai realisasi dan capaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran 1.

Tabel 3.4

**Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Pendukung
Sasaran 1**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	100%	100%	100%
Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja)	3 dok	3	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 dok	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 dok	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 dok	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 dok	1	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LPPD, LKPJ)	6 dok	6	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAKIP	1 dok	1	100%
	Aplikasi E-Survey dan SIPEJABAT	2 Aplikasi	2	100%
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBU	2 dok	2 dok	100%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	12 dok	12 dok	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 dok	12 dok	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	100%	100%	103%
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai	12 dok	12 dok	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat berdasarkan tugas dan fungsi	10 orang	10 orang	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 orang	28 orang	108%
Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	20 jenis	20 Jenis	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	2 buah	2 buah	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik Kantor	200 buah	200 buah	100%

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak : Baliho/Spanduk, Jumlah Cetak Fotocopy	53 lembar 30.000 lembar	53 lembar 30,002 lembar	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	500 orang	500 orang	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 kali	36 kali	100%
Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	100%	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor	13 unit	13 unit	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	35 buah	35 buah	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	500 lembar	500 lembar	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Resi Listrik, Telpon yang dibayar	36 resi	36 resi	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum Kantor	60 jasa	60 jasa	100%
Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	4 unit/ tahun	4 unit/ tahun	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	36 unit	36 unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	30 unit	30 unit	100%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor lain dipelihara dan direhabilitasi per tahun	6 unit	6 unit	100%
Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan DPRD	12 dok	12 dok	100%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Jenis Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	125 set	125 set	100%
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti medical checkup	25 orang	25 orang	100%
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Layanan dalam Penyelenggaraan Administrasi DPRD	5 kali	5 kali	100%
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Layanan dalam Fasilitasi Rapat Fraksi DPRD	6 kali	6	100%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6 kali	6 kali	100%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS dan FUNGSI DPRD	Rata-rata Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD dalam Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Pembentukan Perda	100%	98%	98%

Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Tugas DPRD	100%	80%	80%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah layanan rapat koordinasi	45 kali	45 kali	100%
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dok Laporan Kinerja	1 dok	-	-
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah layanan perjalanan dinas DPRD	1 kali	1 kali	100%
	Jumlah layanan rapat badan musyawarah	24 kali	24 kali	100%
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah koordinasi konsultasi Pimpinan DPRD	50 kali	50 kali	100%

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2022

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 1 disebabkan oleh:

- Sasaran 1 yang didukung oleh 2 program, 10 kegiatan dan 37 sub kegiatan telah dilaksanakan dengan realisasi dan capaian 98%;
- Adapun target yang tidak tercapai yakni pada sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD dikarenakan kurangnya Sumber Daya dalam menyusun Laporan Kinerja DPRD.
- Nilai SAKIP SKPD Tahun 2022 dengan kategori kurang atau predikat C (58,33) dengan rekomendasi yang telah dijabarkan di atas, menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan upaya memenuhi rekomendasi yang tertuang dalam LHE SAKIP.

2. Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD

- Realisasi capaian sasaran 2 yakni ***“Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD”*** dengan indikator Laporan Keuangan yang sesuai SAP untuk realisasi tahun 2022 yakni telah sesuai dinilai dari pelaksanaan kinerja kegiatan pendukung yaitu kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang telah memenuhi target dokumen dan proses pelaksanaan kegiatan yang sesuai SAP. Adapun tahun 2021 Sekretariat DPRD memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang dinilai oleh BPK.

Tabel 3.5

Target dan Realisasi Sasaran 2

SASARAN 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD	Laporan Keuangan yang sesuai	Hasil Penilaian Laporan Keuangan Oleh Inspektorat	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	SAP				
--	-----	--	--	--	--

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2022

Sasaran 2 didukung oleh **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan kegiatan **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** yang terdiri dari 7 Sub Kegiatan. Berikut nilai realisasi dan capaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran 2.

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan
Pendukung Sasaran 2

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kualitas pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD	100%	100%	100%
Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN	12 dok	12	100%
Penyediaan Adminisrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Aministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	1	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	12	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Akuntansi	12 dok	12	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1	100%
Pegelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Bahan Pemeriksaan	1 dok	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Dokumen RFK	12 dok	12	100%

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2022

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 2 disebabkan oleh:

- a. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran 2 telah dilaksanakan secara keseluruhan dengan realisasi dan capaian 100% diperoleh dari komitmen dan kerja sama dari masing-masing pihak yang

terlibat;

- b. Realisasi capaian sasaran 2 yakni **“Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD”** dengan indikator Laporan Keuangan yang sesuai SAP tahun 2022 telah sesuai SAP dan mencapai target.

3. Sasaran 3 : Meningkatkan Dukungan Layanan Dan Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Yakni Fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran Dan Fungsi Pengawasan

Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan terdiri dari dua Indikator kinerja dengan tolak ukur capaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Sasaran 3

SASARAN 3					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	Realisasi Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah + Realisasi Program Pengembangan Regulasi Daerah + Realisasi Program X 100% 3	100%	100%	100%
	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat	Hasil survey Kepuasan oleh Anggota DPRD	65	77	118%

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2022

Pelaksanaan sasaran 3 didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Layanan Administrasi DPRD sub kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD, dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terdiri dari 8 kegiatan dan masing-masing sub kegiatan. Berikut nilai realisasi dan capaian pada program, dan kegiatan yang mendukung sasaran 3.

Tabel 3.8
Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan
Pendukung Sasaran 3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100%
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	100%	100%	100%
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Layanan dalam Fasilitasi Rapat Fraksi DPRD	6 kali	6	100%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS dan FUNGSI DPRD	Persentase Program Kerja DPRD Tersusun dan Terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan	100%	100%	100%
	Rata-rata Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD dalam Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Pembentukan Perda	100%	98%	98%
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Layanan dalam Pembahasan Perda (%)	100%	100%	102%
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Layanan Kunker /konsultasi	5 kali	5 kali	100%
	Jumlah layanan rapat	3 kali	3 kali	100%
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah layanan kunker	15 kali	16 kali	107%
	Jumlah layanan rapat	18 kali	18 kali	100%
Pembahasan kebijakan anggaran	Persentase Rapat Pembahasan yang terselenggara terhadap rapat yang terjadwal	100%	100%	100%
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah layanan rapat dalam pembahasan KUA PPAS	10 kali	10 kali	100%
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah layanan rapat dalam pembahasan KUA PPAS Perubahan	10 kali	10 kali	100%
Pembahasan APBD	Jumlah layanan konsultasi/evaluasi pembahasan APBD	1 kali	1 kali	100%
	Jumlah layanan rapat pembahasan APBD	12 kali	12 kali	100%
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah layanan konsultasi/evaluasi	1 kali	1 kali	100%

	Jumlah layanan rapat	12 kali	12 kali	100%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah layanan konsultasi /evaluasi	1 kali	1 kali	100%
	Jumlah Layanan rapat	12 kali	12 kali	100%
Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-Rata Persentase Rapat dan Kunjungan Kerja yang terselesaikan terhadap rapat yang terjadwal	100%	104%	104%
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah layanan kunjungan kerja	5 kali	5 kali	100%
	Jumlah layanan rapat	10 kali	10 kali	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah layanan kunjungan kerja	5 kali	5 kali	100%
	Jumlah layanan rapat	10 kali	10 kali	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah layanan kunjungan kerja	5 kali	5 kali	100%
	Jumlah layanan rapat	10 kali	10 kali	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah layanan kunjungan kerja	5 kali	5 kali	100%
	Jumlah layanan rapat	10 kali	10 kali	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah layanan kunjungan kerja	5 kali	5 kali	140%
	Jumlah layanan rapat	10 kali	10 kali	100%
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah layanan kunjungan kerja	5 kali	5 kali	120%
	Jumlah layanan rapat	10 kali	10 kali	110%
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah layanan kunjungan kerja Jumlah layanan rapat	10 kali	10 kali	100%
	jumlah layanan rapat			
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah layanan kunjungan kerja	5 kali	5 kali	100%
	jumlah layanan rapat			100%
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD	100%	100%	100%
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan BIMTEK	78 Orang/tahun	78 Orang/tahun	100%
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah layanan dalam publikasi dan dokumentasi dewan	60 Jasa/tahun	60 Jasa/tahun	100%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar	21 Orang/perda	21 Orang/perda	100%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	60 Orang	60 Orang	100%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	3 Kali	3 Kali	100%
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah layanan rapat intem	2 Kali	2 Kali	100%
Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Cakupan Layanan dalam penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	100%	100%	100%

	Masyarakat (%)			
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Layanan Dalam Pelaksanaan kunker	75 kali	75 kali	100%
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran	2 dok	2 dok	100%
Pelaksanaan Reses	Jumlah Layanan dalam Pelaksanaan Reses	75 kali	75 kali	100%
Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Cakupan Layanan dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	100%	100%	100%
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah layanan dalam rapat intem	5 Kali	5 Kali	100%
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Tugas DPRD	100%	80%	80%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Layanan Rapat Koordinasi	45 kali	45 kali	100%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Layanan Perjalanan Dinas DPRD	1 kali	1 kali	100%
	Jumlah Layanan Rapat Badan Musyawarah	24 kali	24 kali	100%
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Koordinasi Konsultasi Pimpinan DPRD	50 kali	50 kali	100%

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2022

Adapun yang menjadi penjelasan pada setiap indikator yang mendukung pencapaian sasaran strategis 3 adalah sebagai berikut.

a. Indikator 1 : Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat

Data Dukung Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat

Tabel 3.9
Penilaian Quisioner Survey IKPL Sekretariat DPRD

No	Pernyataan	Skala Penilaian Responden 25 Anggota Dewan				
		SP	P	KP	TP	STP
Dukungan Sumber Daya Manusia						
1	Kompetensi dan Profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan	0	25	0	0	0
2	Inisiatif, komunikatif, dan kerjasama PNS dalam memberikan dukungan layanan dewan	0	25	0	0	0
3	Disiplin Kerja (Mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja diluar jam kerja	0	25	0	0	0
4	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan menyiapkan materi persidangan	0	25	0	0	0
5	Disiplin Kerja (Mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja diluar jam kerja	0	25	0	0	0
Pelayanan Alat Kelengkapan						
6	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas	0	25	0	0	0
7	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen	0	25	0	0	0

	perjalanan dinas					
8	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan	0	25	0	0	0
9	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan dinas	0	25	0	0	0
Pelayanan Kesehatan						
10	Komunikasi dan informasi mengenai adanya fasilitas kesehatan dewan	0	25	0	0	0
11	Komunikasi dan informasi hasil pelayanan kesehatan	0	25	0	0	0
Penyediaan Sarana dan Prasarana						
12	Keramahan, Kecepatan dan ketelitian petugas dalam merespon keluhan (dilingkungan gedung DPR)	0	25	0	0	0
13	Kualitas ruang kerja anggota	0	15	10	0	0
14	Kualitas ruang rapat paripurna dan ruang AKD	0	5	20	0	0
15	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, lift, dan alat pendingin)	0	3	10	12	0
Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan						
16	Fasilitas pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD	0	5	20	0	0
17	Publikasi kegiatan DPRD kepada masyarakat		23	2	0	0
18	Fasilitasi tamu-tamu DPRD	0	25	0	0	0
Pelayanan Persidangan dan Risalah						
19	Fasilitasi kegiatan hearing dan reses	0	25	0	0	0
20	Fasilitasi bahan kegiatan rapat paripurna, rapat paripurna istimewa dan koordinasi pelantikan anggota DPRD	0	25	0	0	0
21	Fasilitasi Penyediaan akomodasi (jamuan, tempat, sound system) kegiatan rapat DPRD	0	5	20	0	0
Pelayanan Bagian Perundang-Undangan dan Pengkajian						
22	Fasilitasi bahan rancangan penyusunan naskah akademik dan ranperda prakarda DPRD	0	25	0	0	0
23	Fasilitasi penyediaan tenaga ahli dan staf ahli fraksi DPRD	0	25	0	0	0
24	Kajian dan fasilitas gugatan hukum terhadap DPRD	0	25	0	0	0
Pelayanan Bagian Keuangan						
25	Ketepatan waktu penyampaian gaji dan tunjangan DPRD	0	25	0	0	0
26	Komunikasi dan informasi mengenai hak-hak DPRD	0	25	0	0	0
27	Penyusunan/perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan DPRD	0	25	0	0	0
Jumlah Skala Penilaian 25 Anggota Dewan atas 27 Pernyataan		0	581	82	12	0

Sumber : <http://www.ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/>, diakses pada Januari 2022

Keterangan :

- SP : Sangat Puas
- P : Puas
- KP : Kurang Puas
- TP : Tidak Puas
- STP : Sangat Tidak Puas
- Skor Nilai SP : 5
- Skor Nilai P : 4
- Skor Nilai KP : 3
- Skor Nilai TP : 2
- Skor Nilai STP : 1
- **25 Anggota Dewan x 27 Pernyataan : 675 Jawaban**

Tabel 3.10
Perhitungan Penilaian Quisisioner Survey IKPL Sekretariat DPRD

Penilaian	Jumlah Skala Penilaian 25 Anggota Dewan atas 27 Pernyataan	Skor	Total Skor
1	2	3	4 = 2x3
Sangat Puas	0	5	0
Puas	581	4	2324
Kurang Puas	82	3	246
Tidak Puas	12	2	24
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total	675		2594

Sumber : <http://www.ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/>, diakses pada Januari 2023

Keterangan

Y : Skor Tertinggi x Jumlah Skala Penilaian 25 Anggota Dewan atas 27 Pernyataan

Y : 5 x 675 = 3.375

Rumus Indeks Kepuasan : $\frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$

$$: \frac{2594}{3.375} \times 100$$

: 77

Adapun yang menjadi catatan dari Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar terkait kepuasan Anggota DPRD, yakni:

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana
 - a. Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang AKD
 - AC perlu perbaikan karena kurang dingin
 - Perlunya penyegaran suasana ruangan dengan pengecatan ulang
 - Kurang berfungsinya mic pada ruang rapat
 - b. Kualitas Sarana Pendukung (Toilet, Taman, Lift, dan Alat Pendingin)
 - Toilet, ruangan dan perlu dibersihkan secara berkala
 - Ketersediaan air masih kurang stabil
- 2) Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan
 - a. Perlu adanya sarana pengaduan secara online untuk mengakomodir kepentingan orang kepulauan
 - b. Setiap kegiatan agar selalu dipublikasi oleh tenaga pendamping
- 3) Pelayanan Persidangan dan Risalah
 - a. Jamuan makan dan minum agar lebih bervariasi
 - b. Perisalah rapat harus selalu stand by ketika rapat

Dari perhitungan dan penjelasan diatas, diperoleh analisis terhadap Indikator 1 yakni Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat sebagai berikut.

- Realisasi dan Capaian indikator Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat Tahun 2022 diperoleh nilai 77 dengan persentase capaian dari target adalah 108% yang diperoleh dari hasil survey yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD melalui website <http://www.ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/> yang dapat diakses oleh 25 Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Responden Survey Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat adalah 25 orang Anggota DPRD Kab. Kep Selayar atas 27 pernyataan sehingga diperoleh total 675 jawaban bervariasi dengan skala penilaian Sangat Puas dengan skor 5, Puas dengan Skor 4, Kurang Puas dengan skor 3, Tidak Puas dengan skor 2, dan Sangat Tidak Puas dengan skor 1. Dari Tabel 3.10 diatas diperoleh angka bahwa dari 25 Anggota DPRD Kab Kep. Selayar dengan 27 pernyataan diperoleh 675 jawaban dengan penilaian yakni 581 Jawaban Puas, 82 Jawaban Kurang Puas dan 1 jawaban Tidak Puas. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja indikator pertama sasaran ketiga disebabkan oleh:
 - a. Dengan perolehan 581 Jawaban Puas, 82 Jawaban Kurang Puas dan 1 jawaban Tidak Puas oleh Anggota DPRD Kab. Kep Selayar atas 27 pernyataan yang diberikan, hal ini diperoleh dengan komitmen, kerjasama, konsistensi dan masukan dari berbagai pihak.
 - b. Adapun yang menjadi penyebab dari jawaban kurang puas dan tidak puas yakni terkait kondisi sarana dan prasarana serta pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, hal ini kemudian menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD untuk berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan pelayanan maksimal.

b. Indikator 2 : Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Tepat Waktu

Data Dukung Pelaksanaan Program Kerja DPRD Tepat Waktu

Berdasarkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021, ada 3 program Kerja DPRD

yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 yakni :

- a. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Program Pengembangan Regulasi Daerah
- c. Program Peningkatan Kehumasan DPRD.

Pelaksanaan ketiga program kerja DPRD ini di dukung oleh Sekretariat DPRD melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD.

Berikut pengintegrasian program kerja DPRD ke dalam program kerja Sekretariat DPRD, yang selanjutnya akan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran DPRD.

Tabel 3.11

**PENYELARASAN / PENGINTEGRASIAN PROGRAM KERJA DPRD
KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN SEKRETARIAT DPRD TA 2022**

No	Program Kerja DPRD			Program Kerja Sekretariat DPRD	
1.	Program : Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Workshop, Seminar , Lokakarya Pelatihan	Program : dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD Sub.Kegiatan : - Orientasi DPRD/ Bimbingan Teknis DPRD/ Pendalaman Tugas DPRD
		Kegiatan : Penyelenggaraan Tugas Fraksi-fraksi	- Rapat Fraksi, - Penyusunan Pandangan Umum dan Penyiapan Rekomendasi Fraksi	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan : Fasilitasi Fraksi DPRD
				Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan : - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

		<p>Kegiatan : Penyelenggaraan Kinerja Anggaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Kerja/Intern Pembahasan KUA PPAS Pokok dan perubahan, - Rapat Kerja/Intern Pembahasan APBD Pokok dan perubahan, - Rapat Koordinasi/ konsultasi - Harmonisasi pokok-pokok pikiran DPRD - Evaluasi APBD/APBD Perubahan 	<p>Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD</p>	<p>Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan KUA PPAS - Pembahasan KUA PPAS Perubahan - Pembahasan APBD - Pembahasan APBD Perubahan - Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD <p>Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpinan Aspirasi masyarakat Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD
		<p>Kegiatan : Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Kerja / Intern pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan perda dan pergub, pengawasan kebijakan dan pemerintahan daerah , dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai bidang tugas dari komisi-komisi - Melakukan Kunjungan kerja/konsultasi terkait hasil rapat terhadap fungsi pengawasan tersebut 	<p>Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD</p>	<p>Kegiatan : Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Sub Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Insfrakstruktur - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam - Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK - Pengawasan Penggunaan Anggaran - Pembahasan Laporan Keterangan

					Pertanggungjawaban Kepala Daerah
		Kegiatan : Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan (Pimpinan, Bamus, dan badan kehormatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Komisi (Internal/Kerja) - Rapat Badan Musyawarah - Rapat Badan Kehormatan - Rapat koordinasi konsultasi DPRD - Kunjungan Kerja / koordinasi konsultasi 	Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD - Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah - Fasilitasi tugas DPRD Kegiatan : Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Kode Etik DPRD Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD Sub.Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Program Kerja DPRD
2	Program Pengembangan Regulasi Daerah	Kegiatan : Penyelenggaraan Kinerja Legislasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan pembahasan draft produk hukum inisiatif, - memfasilitasi bapemperda dalam membuat kajian kelayakan sebuah perda untuk dibahas - Penyusunan serta pengelolaan Program Pembentukan Perda. - Pembahasan Rancangan Perda dalam rapat-rapat, hearing dengan pakar, konsultasi dan kunjungan kerja sesuai dengan jadwal bamusy dan tata tertib 	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - Penyusunan Naskah Akademik Kegiatan : Peningkatan kapasitas DPRD Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

3	Program Peningkatan Kehumasan DPRD	Kegiatan : Peningkatan Kehumasan	- Penyelenggaraan hubungan kasyarakat berupa sosialisasi nilai nilai kebangsaan,	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan: Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
		Kegiatan : Pemberitahuan DPRD	- Menjalin Kemitraan dengan stakeholder, media elektronik maupun cetak untuk memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan: Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
		Kegiatan : Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	- Pelaksanaan reses - Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah,identifikasi permasalahan ke Kecamatan, pertemuan/ /diskusi dengan - Masyarakat terkait di penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPRDmelalui kegiatan hearing dengar pendapat, penerimaan demonstrasi dan unjuk rasa.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan: Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan - Pelaksanaan Reses - Kunjungan Kerja dalam daerah

Berdasarkan data capaian Kinerja Sekretariat DPRD, maka realisasi kinerja pada indikator kedua sasaran 3 yakni persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD yakni :

- Pendalaman Tugas DPRD;
- Fasilitasi Fraksi DPRD;
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
- Pembahasan KUA PPAS;
- Pembahasan KUA PPAS Perubahan;
- Pembahasan APBD;
- Pembahasan APBD Perubahan;
- Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD;
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum;
- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Insfrakstruktur;
- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK;
- Pengawasan Penggunaan Anggaran;
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
- Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah;
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD;
- Pengawasan Kode Etik DPRD;
- Penyusunan Program Kerja DPRD.

Formulasi pengukurannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Total Realisasi Sub Kegiatan}}{\text{Total Target Sub Kegiatan}}$$

$$\begin{aligned} & \frac{78+6+60+10+10+(1+12)+(1+12)+(1+12)+2+(5+10) (5+10)}{78+6+60+10+10+(1+12)+(1+12)+(1+12)+2+(5+10) +(5+10)} \\ & : \frac{+ (5+10)+(5+10)+(7+10)+(6+11)+10+5+45+(1+24)+50+5+2}{+(5+10))+(5+10)+(5+10)+(5+10)+10+5+45+(1+24)+50+5+2} \\ & : \frac{441}{437} = 101\% \end{aligned}$$

Catatan :

- Rumus Realisasi menggunakan rumus Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian dengan nilai yang diperhitungkan yakni hasil pelaksanaan sub kegiatan pada Program Kerja Sekretariat DPRD yang mendukung dan memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan Program Kerja DPRD.

- Realisasi Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang didukung oleh 22 sub kegiatan diperoleh nilai 101% dari target yang telah ditentukan.

b. Program Pengembangan Regulasi Daerah;

Program ini di dukung oleh :

- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- Penyusunan Naskah Akademik (Recofusing Anggaran);
- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli.

Formulasi pengukurannya adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi : $\frac{\text{Total Realisasi Sub Kegiatan}}{\text{Total Target Sub Kegiatan}}$

$$: \frac{(5+3)+(16+18)+0+21}{(5+3)+(15+18)+0+21}$$

$$: \frac{63}{62} = 101\%$$

Catatan :

- Realisasi menggunakan rumus Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian dengan nilai yang diperhitungkan yakni hasil pelaksanaan sub kegiatan pada Program Kerja Sekretariat DPRD yang mendukung dan memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan Program Kerja DPRD;
- Realisasi Program Pengembangan Regulasi Daerah yang didukung oleh 4 sub kegiatan diperoleh nilai 101% dari target yang telah ditentukan. Adapun pada sub kegiatan Penyusunan Naskah Akademik telah dianggarkan pada TA 2022 namun tidak dilaksanakan karena adanya Recofusing Anggaran.

c. Program Peningkatan Kehumasan DPRD:

Program ini di dukung oleh beberapa kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD yakni :

- Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- Publikasi dan dokumentasi dewan;
- Pelaksanaan reses;
- Kunjungan kerja dalam daerah.

$$\begin{aligned} \text{Rumus Realisasi} & : \frac{\text{Total Realisasi Sub Kegiatan}}{\text{Total Target Sub Kegiatan}} \\ & : \frac{3+60+75+75}{3+60+75+75} \\ & : \frac{213}{213} \quad 100\% \end{aligned}$$

Catatan :

- Realisasi menggunakan rumus Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian dengan nilai yang diperhitungkan yakni hasil pelaksanaan sub kegiatan pada Program Kerja Sekretariat DPRD yang mendukung dan memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan Program Kerja DPRD;
- Realisasi Program Peningkatan Kehumasan DPRD yang didukung oleh 4 sub kegiatan diperoleh nilai 100% dari target yang telah ditentukan.

Dari perhitungan di atas, diperoleh penjelasan/analisis terhadap Indikator 2 yakni Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Tepat Waktu sebagai berikut.

- Realisasi dan Capaian indikator Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu diperoleh nilai 100%, keberhasilan ini didukung oleh komitmen dan kerja sama Sekretariat DPRD, Anggota DPRD dan pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kerja DPRD;
- Adapun sub kegiatan Penyusunan Naskah Akademik yang difocusing karena mempertimbangkan keadaan anggaran dan kepentingan pelaksanaan sub kegiatan/kegiatan.

C. Realisasi Keuangan

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran TA 2022 Berdasarkan Peruntukannya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	REALISAI (%)	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP SKPD	B(60)	C (58,33)	C (58,33)	15.663.214.420	15.293.994.714,00	97,64 %
Meningkatnya pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	Laporan Keuangan yang sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	100%	2.054.633.500	2.045.589.036	99,56 %
Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100%	100%	100%	18.072.521.800	17.949.935.423	99,32 %
	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat	65	77	118%			
Total Anggaran					35.790.369.720	35.289.519.173	98,60 %

Sumber : RFK Bulan Desember Sekretariat DPRD Kab Kep Selayar Tahun 2022

Tabel 3.13

Capaian Realisasi Anggaran TA 2022 Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.732.007.320	17.356.959.750	98%
Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	195.686.500	189.853.700	97%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.400.000	75.408.800	99%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	12.400.000	12.190.000	98%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	12.400.000	11.642.500	94%
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	9.400.000	8.705.000	93%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	9.400.000	8.007.000	85%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.286.500	38.744.000	99%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.400.000	35.156.400	97%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.054.633.500	2.045.589.036	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.924.732.000	1.919.398.536	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	2.957.000	99%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.549.500	50.872.500	99%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	31.040.000	30.545.000	98%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.600.000	9.210.500	96%
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	13.458.000	12.780.000	95%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21.254.000	19.825.500	93%
Admnistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	39.510.000	39.326.500	100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	4.931.000	99%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.510.000	24.510.000	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	9.885.500	99%
Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	747.830.000	747.226.906	99%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18.400.000	18.130.000	99%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	165.000.000	163.499.020	99%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	569.430.000	565.597.886	99%
Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	972.396.000	967.555.600	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.310.000	15.217.000	99%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	92.650.000	91.343.500	99%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	75.000.000	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.500.000	45.978.000	97%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.500.000	39.824.000	96%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700.436.000	700.193.100	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.016.500	350.346.413	97%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.616.500	137.946.413	97%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	218.400.000	212.400.000	97%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.063.005	396.061.648	93%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.400.000	11.536.000	93%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	281.920.005	266.448.488	95%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.743.000	118.077.160	90%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	660.670.000	635.285.720	96%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.264.000	169.140.404	92%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.022.000	72.556.816	88%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.370.000	34.854.000	96%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	359.014.000	358.734.500	100%

Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	12.198.008.815	11.928.996.227	98%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.329.244.815	11.071.728.582	98%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	444.044.000	437.750.400	99%
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	419.720.000	419.517.245	100%
Layanan Administrasi DPRD	77.193.000	56.718.000	73%
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	27.800.000	18.532.500	67%
Fasilitasi Fraksi DPRD	19.383.000	17.376.000	90%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30.010.000	20.809.500	69%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18.058.362.400,00	17.932.559.423	99%
Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	3.397.139.100	3.382.261.000	100%
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	355.350.000	350.874.200	99%
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.041.789.100	3.031.386.800	100%
Pembahasan Kebijakan Anggaran	787.341.200	779.225.300	99%
Pembahasan KUA dan PPAS	40.702.100	40.694.000	100%
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	41.390.100	41.335.000	100%
Pembahasan APBD	289.392.000	288.661.000	100%
Pembahasan APBD Perubahan	221.451.000	221.018.900	100%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	194.406.000	187.516.400	96%
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.220.280.000	1.174.751.200	96%
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	228.935.000	227.588.400	99%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	209.450.000	204.694.900	98%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	206.840.000	202.318.900	98%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	175.850.000	167.161.700	95%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	205.150.000	191.539.900	93%
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	167.755.000	158.332.900	94%
Pengawasan Penggunaan Anggaran	12.950.000	10.250.000	79%
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	13.350.000	12.864.500	96%
Peningkatan Kapasitas DPRD	5.574.407.500	5.508.559.691	99%
Pendalaman Tugas DPRD	1.548.752.500	1.545.569.691	100%
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	415.800.000	412.800.000	99%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	202.399.000	196.710.000	97%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	183.000.000	164.800.000	90%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3.189.456.000	3.180.980.000	100%
Penyusunan Program Kerja DPRD	8.000.000	7.700.000	96%
Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.471.209.000	2.469.480.500	100%
Kunjungan Kerja dalam Daerah	321.209.000	319.480.500	99%

Penyusunan PokokPokok Pikiran DPRD	5.000.000	5.000.000	100%
Pelaksanaan Reses	2.145.000.000	2.145.000.000	100%
Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD	75.000.000	68.027.300	91%
Pengawasan Kode Etik DPRD	75.000.000	68.027.300	91%
Fasilitasi Tugas DPRD	4.532.985.600	4.550.254.432	100%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.127.520.000	3.125.684.532	100%
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	5.223.600	0	0%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	179.700.000	177.846.700	99%
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.247.542.000	1.246.723.200	100%
Total Anggaran 2022 (APBD Perubahan Tahun 2022)	35.790.369.720,00	35.289.519.173	98,6%

Sumber : RFK Bulan Desember Sekretariat DPRD Kab Kep Selayar Tahun 2022

Adapun sub kegiatan yang memperoleh realisasi anggaran rendah, yakni.

1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD dengan realisasi keuangan 67%, hal ini telah disesuaikan dengan kebutuhan kinerja yang telah tercapai dan dirasa perlu adanya penghematan anggaran sehingga terdapat sisa anggaran pada belanja makanan minuman rapat, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, dan belanja jasa tenaga administrasi;
2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dengan realisasi keuangan 69%, hal ini disebabkan karena belanja jasa tenaga administrasi yang dianggarkan Rp. 12.000.000 namun yang direalisasikan hanya Rp. 2.800.000 sesuai dengan kebutuhan jasa tenaga administrasi yang diperlukan untuk Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD pada TA 2022;
3. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD dengan realisasi 0% dikarenakan kurangnya Sumber Daya dalam menyusun Laporan Kinerja DPRD sehingga sejalan dengan hal itu maka realisasi keuangan tidak dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar tahun 2022 memiliki 3 sasaran strategis yaitu:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dengan indikator nilai SAKIP SKPD Tahun 2022 yakni kategori kurang atau predikat C (58,33) dengan rekomendasi yang telah dijabarkan di atas, menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan upaya memenuhi rekomendasi yang tertuang dalam LHE SAKIP;
 - b. Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD dengan indikator Laporan Keuangan yang sesuai SAP telah sesuai SAP dan mencapai target;
 - c. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan dengan dua indikator yakni Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat telah memenuhi target dengan nilai 77 dengan persentase capaian 118% dengan kategori sangat tinggi kemudian indikator Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu memperoleh realisasi 100% telah memenuhi target dengan kriteria realisasi sangat tinggi
2. Realisasi anggaran sebesar Rp 35.289.519.173 atau 98,6%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 500.850.547,00 atau 1,4%.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan formasi bidang tugas yang dibutuhkan serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan terhadap DPRD
2. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan DPRD, dan dengan pihak-pihak terkait dalam penyusunan agenda kegiatan maupun pelaksanaannya secara lebih cermat.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan bahan acuan yakni masukan dari Anggota DPRD dari hasil survei Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat.